



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Februari 2024/Periodik - 2023)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNG KIDUL
UNIT KERJA : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MARKUS TRI MUNARJA**
2. Jabatan : **KEPALA DINAS**
3. NHK : **677313**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 581.890.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 263 m²/160 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 342.606.000
2. Tanah Seluas 303 m² di KAB / KOTA SLEMAN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 38.784.000
3. Tanah Seluas 87 m² di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 5.500.000
4. Bangunan Seluas 127 m² di KAB / KOTA BANTUL, LAINNYA Rp. 195.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 461.650.000**

1. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SUPRA X Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, YAMAHA GEAR125S Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 18.350.000
4. MOTOR, VESPA SPRINT IGET 150A BS AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 58.300.000
5. MOBIL, TOYOTA RUSH 1.5 S AT Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 298.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp. 22.692.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	29.428.425
F. HARTA LAINNYA	Rp.	5.500.000
Sub Total	Rp.	1.101.160.425
III. HUTANG	Rp.	150.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	951.160.425

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.